

Kejagung Bantah Ambil Alih Kasus Nikel yang Dihentikan KPK

Updates. - WARTAWAN.ORG

Jan 3, 2026 - 11:05



Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna

JAKARTA - Menyikapi simpang siur informasi yang beredar, Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi tegas terkait penanganan kasus dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pihak Kejagung membantah keras anggapan bahwa mereka telah mengambil alih penyidikan yang sebelumnya dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa proses penyidikan yang dijalankan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak memiliki kaitan sama sekali dengan pemberhentian kasus serupa oleh KPK. Ia menekankan bahwa penyidikan di Kejagung telah berjalan jauh sebelum isu penghentian kasus oleh KPK mencuat ke publik.

"Tolong diluruskan. Kami (Kejagung) nggak ambil alih (kasus dari KPK)," tegas Anang, sebagaimana disampaikannya pada Sabtu (3/1/2025). Ia menambahkan bahwa tim Jampidsus sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut kasus korupsi pertambangan nikel di wilayah Konawe Utara sejak bulan September 2025.

Anang menjelaskan, jauh sebelum publik menyoroti penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK pada Rabu (24/12/2025) terkait kasus korupsi pertambangan nikel di Konawe Utara, tim penyidik di Jampidsus-Kejagung telah berbulan-bulan melakukan persiapan dan penerbitan sprindik. Ini menunjukkan bahwa Kejagung memiliki langkah investigatifnya sendiri yang independen.

"Kejagung sudah lama melakukan penyidikan sejak September 2025," ujar Anang. Ia memaparkan bahwa selama periode penyidikan tersebut, tim Jampidsus telah melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk pemeriksaan terhadap banyak saksi, penggeledahan, serta penyitaan aset yang relevan dengan kasus ini.

"Jadi sebelum kasus ini ramai, kami sudah melakukan penyidikan. Dan belum tentu kasusnya sama," ungkap Anang, menekankan bahwa fokus dan objek penyidikan Kejagung mungkin berbeda dengan yang ditangani KPK. Penjelasannya ini bertujuan untuk meluruskan narasi yang berkembang di sejumlah media yang mengesankan adanya pengambilalihan kasus oleh penyidik Jampidsus.

Pada momen konferensi pers akhir tahun yang digelar Rabu (31/12/2025), Anang juga sempat menyampaikan bahwa tim penyidikan di Jampidsus tengah giat melakukan pengusutan terhadap dugaan permasalahan korupsi di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara. "Tim Gedung Bundar sudah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan permasalahan pertambangan nikel di Konawe Utara," ujarnya kala itu. Ini mengkonfirmasi bahwa Kejagung memang memiliki agenda investigasi sendiri yang telah berjalan. (PERS)